

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Renstra ini sangat diperlukan sebagai acuan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh DPPKB Kota Bekasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuannya.

Renstra ini disusun sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu suatu rencana pembangunan yang disusun oleh Kepala Daerah Terpilih untuk menyelesaikan permasalahan/isu strategis yang terdapat di wilayahnya. Renstra disesuaikan dengan urusan yang diampu oleh suatu perangkat daerah, namun ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah di dalam dokumen RPJMD.

Tujuan utama dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi ini adalah untuk menyelaraskan antara perencanaan pembangunan di tingkat Kota dengan rencana program dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah.

Kami menyadari dalam penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini, tentu masih ditemukan berbagai kekurangan. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara teratur untuk menilai efektifitasnya yang kemudian akan digunakan sebagai dasar di dalam merencanakan perubahan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam proses penyusunan Dokumen Renstra ini. semoga Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan manfaat sebagai arahan/pedoman pelaksanaan tugas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Bekasi, 27 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BEKASI**



Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si
NIP. 19670114 198610 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

Daftar Tabel dan Gambar III

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Sistematis Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KOTA BEKASI 6

 2.1 Gambaran Pelayanan 6

 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur DPPKB Kota Bekasi 6

 2.1.2. Sumber Daya DPPKB 13

 2.1.3. Kinerja Pelayanan DPPKB 17

 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 19

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategi DPPKB Kota Bekasi 19

 2.2.1. Permasalahan Pelayanan DPPKB Kota Bekasi 19

 2.2.2. Isu Strategi 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 25

 3.1 Tujuan Renstra DPPKB Kota Bekasi 25

 3.2 Sasaran Renstra DPPKB Kota Bekasi 26

 3.3 Strategi DPPKB Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
 DPPKB 40

 3.4 Arah Kebijakan DPPKB Kota Bekasi 42

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 45

BAB V PENUTUP 73

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	URAIAN	HAL
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi DPPKB Kota Bekasi	12
Tabel 2.1.	Sumber Daya Manusia (SDM) DPPKB Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.2.	Sumber Daya Manusia (SDM) DPPKB Kota Bekasi Berdasarkan Golongan dan Jabatan	14
Tabel 2.3.	Sumber Daya Manusia (SDM) DPPKB Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 2.4	Sumber Daya Manusia (SDM) DPPKB Kota Bekasi Berdasarkan Umur	16
Tabel 2.5.	Aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16
Tabel 2.6.	Realisasi IKU dengan Perbandingan Capaian 5 (Lima) Tahun Sebelumnya	18
Tabel 2.7.	Teknik Menyimpulkan Isu Trategis	22
Gambar 3.1.	Konsep Renstra PD	32
Gambar 3.2.	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra DPPKB Kota Bekasi	33
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rentra DPPKB Kota Bekasi Tahun 2025-2029	34
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra DPPKB Kota Bekasi	35
Tabel 3.3.	Rumusan Arah Kebijakan Renstra DPPKB Kota Bekasi	36
Tabel 3.4.	Target Kinerja 2025-2029 DPPKB Kota Bekasi	38
Tabel 3.5.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	43
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kinerja dan Pendanaan DPPKB Kota Bekasi	46
Gambar 4.1.	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	59
Tabel 4.2.	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPPKB Kota Bekasi ..	60
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas (Sapta Program) Dalam Mendukung Program Prioritas Daerah	62
Tabel 4.4.	Matriks Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2025-2029 dan RAT Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2025	64
Tabel 4.5.	Matriks Intervensi Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2025-2029	66
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Utama DPPKB Kota Bekasi	67
Tabel 4.7.	Indikator Kinerja Kunci DPPKB Kota Bekasi	69
Tabel 4.8.	Cascading DPPKB Kota Bekasi	70
Tabel 4.9.	Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); maka diperlukan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029, merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam jangka 5 (lima) tahun, Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis 2025-2029 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, penyusunan dokumen RENSTRA harus mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, selaras dengan RPJMD Kota Bekasi, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan daerah, indikator kinerja utama (IKU), serta arah kebijakan strategis. Dokumen RENSTRA harus mencakup analisis situasi aktual, perumusan visi dan misi Kota Bekasi, tujuan dan sasaran, strategi pelaksanaan, program dan kegiatan unggulan, serta indikator kinerja yang terukur dan realistis

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Rencana Strategis juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025–2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rencana strategis, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, rancangan akhir, rancangan rencana strategis, hingga penetapan rancangan rencana strategis, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis ini memperhatikan

rancangan rencana strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN dan BKKBN Perwakilan Jawa Barat.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi 2025-2029 disusun sebagai kelanjutan dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
18. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi serta sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah serta menjadi instrumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah dan akuntabilitas kinerja.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

- A. Memberikan arah Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Wali dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- B. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

Bab ini berisi Gambaran Pelayanan DPPKB tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, Kelompok sasaran layanan dan mitra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam pemberian pelayanan.

Bab ini juga berisi permasalahan pelayanan dan Isu Strategis yang menjadi tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, termasuk identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali kota terpilih, telaahan Rancangan Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunann Keluarga/BKKBN, telaahan Rancangan Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah dan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tahun 2025-2029 dan juga membahas rumusan serta arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Pada bab ini juga membahas relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

Bab juga berisi uraian subkegiatan dalam rangka pendukung program prioritas pembangunan di Kota Bekasi dengan penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang Kesimpulan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan urusan Pemerintah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah untuk mencapai Visi ***“Kota Bekasi Yang Nyaman dan sejahtera”*** melalui Misi ke 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Lingkungan Kehidupan Perkotaan Baik Jasmani Maupun Rohani yang Semakin Kondusif dan Berkelanjutan sesuai RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah untuk mencapai visi dan misi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka:

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;

- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
2. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi bertugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik melalui fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
 - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
 - c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
 - d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
 - e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
 - f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas; penyelenggaraan pelayanan kehumasan; pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
3. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta Kader KB dan Kader IMP, pengendalian penduduk dan informasi keluarga dan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kepada PLKB/PKB Kader dan IMP;
 - d. pelaksanaan pengawasan kegiatan advokasi dan penggerakan program KB kepada pemangku kepentingan yang dilakukan oleh PLKB/PKB Kader dan IMP;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan BKB, BKR, BKL dan PIK/R;
 - f. penyiapan bahan dan fasilitasi peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas operasional PKB/PLKB; penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan KB terhadap PUS, PUS belum ber KB, PUS hamil serta peserta KB;
 - g. pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit; 13 perencanaan dan pelaksanaan pendataan keluarga;
 - h. penyiapan bahan dan penyusunan kajian hasil pendataan keluarga;
 - i. penyiapan bahan pencapaian KB aktif dan Akseptor KB baru
 - j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya; pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - l. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
4. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB serta pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. pengelolaan data klinik KB dan fasilitas kesehatan yang teregistrasi;
 - d. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman pengelolaan alat dan obat kontrasepsi;
 - e. penyiapan bahan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi sebagai bahan permintaan ke pemerintah pusat dan provinsi;
 - f. penyiapan bahan dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi;

- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan pencatatan dan pelaporan kepada petugas RR Klinik KB dan Fasilitas Kesehatan;
 - h. penyiapan bahan dan fasilitasi pelayanan KB MKJP;
 - i. pelaksanaan fasilitasi dan konseling kepada calon peserta KB pada momentum hari-hari besar;
 - j. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, sosialisasi serta evaluasi kepada Tim Jaga Mutu pelayanan KB;
 - k. pendataan hari buka klinik KB;
 - l. penyiapan bahan penyusunan target permintaan masyarakat pencapaian akseptor KB Aktif dan peserta KB baru;
 - m. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring pelayanan KB pada Instansi teknis;
 - n. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan terhadap akseptor aktif PIL, akseptor aktif Suntik serta akseptor aktif Kondom melalui Puskesmas, Fasilitas Kesehatan, RS, RSB, RSIA, Praktek Dokter dan Bidan;
 - o. pelaksanaan KIE dan konseling di wilayah perbatasan;
 - p. pelaksanaan pembinaan peserta KB di posyandu;
 - q. pelaksanaan pembinaan akseptor KB dan pelayanan KB baru di wilayah terpencil dan perbatasan;
 - r. penyiapan bahan dan pelaksanaan workshop;
 - s. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - u. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta bina ketahanan remaja untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. penyiapan bahan rumusan sasaran kelompok dan anggota Satyagatra;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok Satyagatra;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan kemitraan akses permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran;

- f. penyiapan bahan dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera; penyiapan bahan penetapan sasaran BKB dan BKL;
- g. penyelenggaraan kegiatan BKB dan BKL;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
- i. penyiapan bahan rumusan NSPK Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
- j. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan ketahanan remaja, KRR dan BKR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; penyiapan bahan penetapan perkiraan sasaran KRR dan BKR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- k. penetapan kriteria, penyerasian dan kelayakan tempat PIK KRR; penyelenggaraan pelayanan konseling KRR;
- l. pelayanan dan penyelenggaraan dukungan operasional KRR dan BKR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- m. penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR dan BKR;
- n. penyiapan bahan dan pembinaan kepada SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR dan BKR;
- o. penyiapan bahan dan pelaksanaan intensifikasi, promosi dan sosialisasi program KRR dan BKR;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- r. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

1. Konseling PUS yang belum ber KB.
2. Pembinaan Akseptor KB Aktif.
3. Pembinaan Akseptor KB Melalui Tim KB Keliling (TKBK).
4. Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Program (KKBPK).
5. Konseling Keluarga Berencana.
6. Study Ketahanan Keluarga Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi Multi Perspektif.
7. Pengembangan Media Belajar tentang Kesehatan Reproduksi Remaja yang Online (E-learning) dan Sosial Media.
8. Penulisan dan Pencetakan Buku Bacaan tentang Keluarga Sejahtera.

9. Program Rintisan Remaja Relawan Kesehatan Reproduksi Untuk Teman Sebaya Berbasis Sekolah, Komunitas dan Lembaga Keagamaan, Rekrutmen, Training, Kegiatan di Lapangan dan Workshop.
10. Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
11. Pembinaan Tri Bina Keluarga (BKB, BKR, dan BKL).
12. Lomba Ketahanan Keluarga dan Penyelenggaraan Hari Keluarga .
13. Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Satyagraha.
14. Pelaksanaan Pembinaan Generasi Berencana.
15. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Ketahanan Keluarga.
16. Pembimbingan Terhadap PKB/PLKB Dalam Memberikan Advokasi dan Penggerakkan Kepada Pimpinan Wilayah, Toga, Kader KB/IMP.
17. Penyusunan Bahan Perencanaan Dalam Pelaksanaan Advokasi dan Penggerakkan Program KB.
18. Pengumpulan Bahan dan Konsep Advokasi dan Penggerakkan.
19. Pelaksanaan Entry Data dan Pelaporan Klinik KB.
20. Pelaksanaan Pendataan Keluarga.
21. Penyusunan Laporan Umpan Balik Pencapaian KB Aktif dan Akseptor Baru Serta Evaluasi Program KB dan Ketahanan Keluarga.
22. Pelaksanaan Pembinaan Teknis PLKB dan PKB.
23. Pelaksanaan Bimbingan Teknis PLKB dan PKB.
24. Pembinaan dan Sosialisasi terhadap PLKB/PKB, Kader dan Kader IMP.
25. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Gaji dan Tunjangan.
26. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU).
27. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU).
28. Verifikasi Keuangan.
29. Surat Masuk.
30. Surat Keluar.
31. Penyusunan Renja.
32. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis.
33. Penyusunan Lakip.
34. Pelayanan Informasi PPID Pelaksana.
35. Usulan Kenaikan Gaji Berkala.
36. Usulan Kenaikan Pangkat.
37. Usulan Pensiun.
38. Usulan Kartu Pegawai.
39. Usulan Kartu Istri / Suami.
40. Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS.
41. Surat Permohonan Cuti.

- 42. Penyusunan Daftar Urut Kepangakatan (DUK).
- 43. Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR).

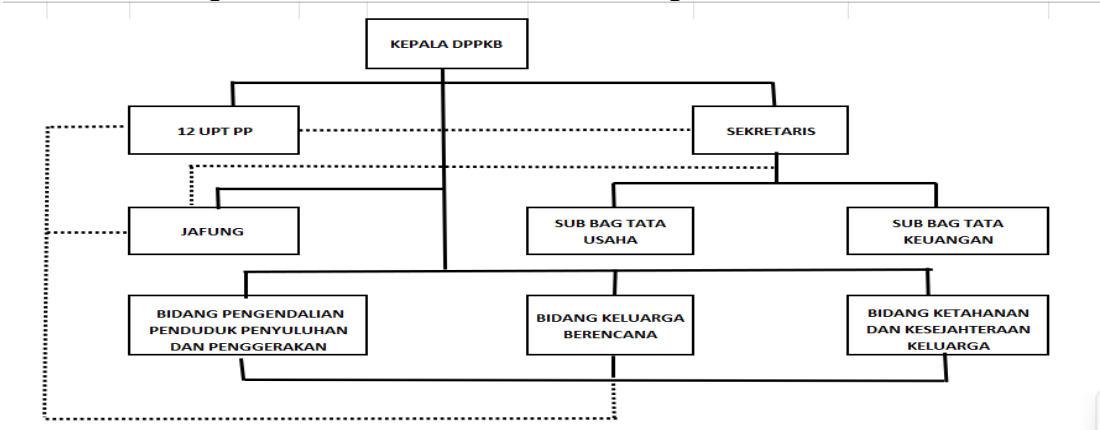
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diatur dalam Perda Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bekasi. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 9 (sebelas) Jabatan Fungsional dan 2 (dua) Kasubag dan 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk (UPTD) yang ditempatkan disetiap Kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Bidang Keluarga Berencana;
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, disajikan dalam Gambar.2.1.

Gambar.2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi



2.1.2. Sumber Daya DPPKB Kota Bekasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam menjalankan program dan kegiatan didukung oleh Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya saat dokumen Renstra DPPKB ini disusun terdiri dari :

- a. 1 orang Kepala Dinas
- b. 0 orang Sekretaris
- c. 2 orang Kepala Bidang
- d. 4 orang Jabatan fungsional yang disetarakan
- e. 2 orang Kasubbag
- f. 25 orang Pelaksana
- g. 12 orang Ka. UPTD PP
- g. 18 orang PPPK
- h. 3 orang TKK

Saat ini jumlah tenaga penyuluh Keluarga Berencana sebanyak 27 orang yang terdiri dari :

- a. 22 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang status kepegawaian sebagai pegawai pusat BKKBN yang ditempatkan di Kota Bekasi.
- b. 5 orang Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) yang diangkat oleh Provinsi Jawa Barat yang ditempatkan di Kota Bekasi.

Petugas Lapangan merupakan kepanjangan tangan dinas dalam pencapaian program KKBPK, dengan demikian Kota Bekasi sebagai instansi pembina perlu melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi dan kompetensi kerja para Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Jumlah Pegawai Perempuan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sebanyak 70 Orang sedangkan Laki-laki 16 Orang hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender karena penempatan pegawai tidak hanya dilihat dari jenis kelamin akan tetapi pendidikan serta keterampilan yang dimiliki karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi merupakan salah satu Dinas yang melakukan pelayanan kepada Masyarakat.

Table 2.1

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Jenis Kelamin :

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-Laki	18
Permpuan	71
Jumlah Total	89

Untuk Sumber Daya Manusia yang menduduki Eselon II sudah sesuai tapi untuk eselon III.A (sekretaris dinas) kosong karena pensiun dan untuk eselon III.B juga terdapat kekosongan jadi belum sesuai dengan formasi yang tersedia, sedangkan untuk tenaga Fungsional saat ini hanya ada empat (4) orang dan belum ada pengangkatan sehingga terjadi kesulitan dalam pembagian tugas karena ada petugas fungsinal yang pensiun belum ada pengangkatan pengisian jabatan tersebut. Sedangkan tenaga Pelaksana di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sudah sesuai dengan analisa jabatan yang dibutuhkan. Untuk Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan PLKB yang merupakan tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana masih membutuhkan tenaga tambahan SDM sesuai dengan Indikator Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk adalah 1:2, Kota Bekasi mempunyai 56 Kelurahan maka diperlukan tenaga sebanyak 112 Orang untuk memenuhi Indikator capaian di tahun ke-3 pada tahun 2026 (digambarkan pada tabel 2.2).

Table 2.2

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Golongan dan Jabatan

Golongan/ Jabatan	Eselon					PKB	PELAKSANA	P3K	TKK	TPD
	II	III.a	III.B	IV.a	IV.B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.a	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-

III.d	-	-	-	11	-	-	4	-	-	-
III.c	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
III.b	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
III.a	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
II.d	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
II.c	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
II.b	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-Golongan	-	-	-	-	-	-	-	18	3	5
Jumlah	1	0	2	17	0	22	16	18	3	5

Pada tabel 2.3 Pejabat Struktural 60 % sudah menyelesaikan pendidikan S2 sedangkan 40 % masih berpendidikan S1 hal ini perlu dukungan untuk meningkatkan strata pendidikan agar pejabat struktural memiliki pendidikan minimal S2 untuk meningkatkan kinerja para Pejabat Struktural, untuk Pelaksana, P3K, PKB, TPD masih banyak yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat sehingga sangat diperlukan peningkatan pendidikan untuk menunjang profesionalisme dalam pegawai dalam melaksanakan tugas.

Tabel 2.3

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Pendidikan

Jabatan/Pendidikan	S3	S2	S1	D III	SMA	SMP
Eslon II		1				
Eslon III.a						
Eslon III.B		2	1			
Eslon IV.a	1	6	8			
Eslon IV.B						
PKB			10	7	5	
Pelaksana			10	3	6	
PPPK			10	2	6	
TPD dan TKK					8	
Jumlah	1	9	39	12	25	

Tabel 2.4
 Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Umur

Jabatan/Pendidikan	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60
Eslon II								1
Eslon III.a								
Eslon III.b							1	1
Eslon IV.a/Jafung yang di setarakan				1	3	4	6	3
Eslon IV.b								
Pelaksana ASN				2	6	5	3	1
P3K		1	3	6	2	5	1	
TKK	2	1						
PKB		3	1	4	2	6	2	4
TKB		2			1	2		
Jumlah	2	7	4	13	14	22	13	10

Dilihat dari umur rata-rata usai produktif dalam bekerja diusia 51-60 tahun sebesar 26,7% dan umur 20-50 tahun sebesar 73,25%.

Pada Tabel 2.5 Kesiediaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana untuk kendaraan roda 4 (empat) sebagai operasional pejabat struktural mobilisasi dalam pelaksanaan pelayanan KB sudah mencukupi. Akan tetapi untuk kendaraan pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi belum memiliki sarana sebagaimana mestinya dilapangan baik kendaraan roda empat dan roda dua. Demikian juga dengan perangkat Komputer belum mencukupi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pegawai DPPKB Kota Bekasi.

Table 2.5
 Aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 4 Mobil	8	8 Kondisi Baik
2	Kendaraan Roda 2 Motor	59	54 Kondisi Baik, 5 rusak sedang
3	PC Unit Komputer	46	Kondisi Baik
4	Laptop Note Book	40	Kondisi Baik
5	Personal Komputer	9	Kondisi Baik
6	Proyektor Infokus	10	Kondisi Baik

7	AC Unit	3	Kondisi Baik
8	Alat Kantor	224	Kondisi Baik
9	Meubel	1	Kondisi Baik
10	Alat Kedokteran KB / Alat Peraga	39	Kondisi Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

Bagian ini Pencapaian kinerja pelayanan menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis periode sebelumnya, sesuai urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dan atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan urusan Keluarga Berencana dengan fokus pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir periode Renstra. Target kinerja terdiri dari sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi yang mencerminkan berfungsinya keluaran, termasuk didalamnya Indikator Program/Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja Eselon II beserta kegiatan yang akan dilakukan (termasuk Indikator Kinerja Kegiatan/IKK) yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan untuk mencapai target/sasaran program dan IKU (outcome) yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.6
 Realisasi IKU dengan Perbandingan Capaian 5 (Lima) Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Presentasi Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	Persentase	27,5	25,01	90,95	28,5	11,10	38,95	30	11,05	36,83			
2	Persentase Tingkat keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Persentase	29,165	25,25	86,58	26,385	64,91	246,01	23,707	3 5,57	150,1			
3	Cakupan PUS yang ber KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persentase	5,75	9,52	60,40	5,50	34,97	15,72	5,00	19,86	25,17			
4	Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan	Persentase										8	12	150
5	Persentase Cakupan Anggota Poktan yang ber KB	Persentase										60	60	100

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi masih terdapat target kinerja yang sudah sesuai dengan target RPJMD dan ada beberapa target kinerja yang memerlukan perencanaan dan strategi yang lebih baik lagi.

2.1.4. Kelompok Sasaran layanan

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi memfokuskan kinerja pelayanannya pada kelompok sasaran Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu Hamil dan Nifas, serta pasangan yang ingin membatasi jumlah anak dan mengatur jarak kehamilan, serta Pengendalian Penduduk, selain itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi juga membidik remaja melalui program Generasi Berencana (Genre) dan keluarga secara keseluruhan melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta kelompok Peningkatan Usaha Keluarga.

Berdasarkan Kelompok sasaran layanan, diantaranya : Kemendukbangwa/BKKBN, Bappelitbangwa, Disdik, Disdukcapil, DP3A, Dinsos, DLH, Disnaker, DKPPP, Kecamatan dan Kelurahan, serta petugas penyuluh KB sebagai pegawai pusat yang ditempatkan di Kota Bekasi, dibantu juga dari Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang ada di tingkat RW dan RT se-Kota Bekasi, sebagai penggerak program BANGGA KENCANA di tingkat dasar.

Kelompok sasaran layanan lainnya adalah organisasi atau lembaga yang menjadi mitra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi antara lain fasilitas layanan kesehatan swasta, perguruan tinggi dan Perusahaan swasta.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

1. Dengan iBangga sebesar 64,96 di tahun 2024 menandakan bahwa pembangunan kualitas keluarga masuk dalam klasifikasi “Berkembang” sehingga perlu peningkatan agar mencapai “Tangguh”;

Mencapai Keluarga tangguh adalah keluarga yang memiliki ketahanan dalam tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Tangguh secara fisik

Mencakup kesehatan seluruh anggota keluarga sejak dini, termasuk pemenuhan gizi, sanitasi, dan akses layanan kesehatan.

Strategi :

- Ikut program Keluarga Berencana (KB).
- Pemeriksaan kehamilan dan pemantauan tumbuh kembang anak (0–6 tahun).

- Pemenuhan gizi seimbang, terutama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
 - Ikut Posyandu, PAUD, dan Bina Keluarga Balita (BKB).
 - Ciptakan rumah sehat dan lingkungan bersih.
- b. Tangguh secara ekonomi
- Kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) dan memiliki pendapatan yang stabi.
- Strategi:**
- Kembangkan keterampilan melalui pelatihan ekonomi keluarga (UMKM, wirausaha).
 - Ikut serta dalam kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).
 - Buat perencanaan keuangan keluarga: pengeluaran, tabungan, dana darurat.
 - Diversifikasi sumber penghasilan (usaha rumahan, keterampilan digital).
- c. Tangguh secara psikososial
- Mampu mengelola stres, membina hubungan yang harmonis antaranggota keluarga, serta menerapkan nilai-nilai budaya, agama, dan moral.
- Strategi:**
- Bangun komunikasi efektif dalam keluarga.
 - Ikut Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
 - Ajak anak terlibat dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
 - Berikan keteladanan moral dan etika, serta praktik ibadah bersama.
 - Saling menghargai dan membina peran masing-masing anggota keluarga.
2. Kualitas keluarga terutama pada aspek kemandirian yang masih rendah dengan capaian hanya 55,62 poin di tahun 2024.
3. Belum tercapainya indikator Pada Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi yaitu :
- a. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga sudah 100 % tapi perlu dipertahankan
 - Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan masih diangka 25,67 perlu ditingkatkan sehingga indek lansia berdaya dapat di capai

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) walau sudah tercapai di tahun 2024 yaitu 52,1 ini terus perlu ditingkatkan
- Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) target 18,1 baru tercapai 19,3
- Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) kota Bekasi perlu terus di tekan dari angka 2024 yaitu turun dari 25,67

c. Program Pengendalian Penduduk

- Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) tahun 2024 yaitu 1,81 dan perlu ditekan walaupun sudah rendah
- Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19) sudah 5,2 di tahun 2024 ini juga perlu terus di turunkan sehingga kelahiran usia remaja berkurang untuk mewujudkan keluarga berkualitas

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi yang bersumber dari Isu Strategis Kota Bekasi adalah :

Tabel 2.7.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPPKB Kota Bekasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan DPPKB	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Adanya potensi ledakan jumlah penduduk Kota Bekasi sehingga perlu mengantisipasi penyediaan lapangan pekerjaan serta ruang dan lahan untuk tempat tinggal, sarana prasarana, serta aktivitas perekonomian lainnya. 2. Tekanan Jumlah penduduk yang semakin besar 3. Adanya fenomena aging population dimana jumlah masyarakat lansia relatif banyak dibandingkan usia produktif. 4. Masih adanya permasalahan stunting.	1.Peningkatan Kesadaran ber KB 2.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengendalikan jumlah dan kualitas keluarga. 3.Terbatasnya capaian peserta KB aktif terutama di wilayah tertentu (perkotaan vs pedesaan). 4.Prevalensi stunting masih tinggi	1.Dampak pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan sumber daya alam 2. Masih adanya stunting sebesar 2,89 persen yang mayoritas berada di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh, serta pola makan yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi berimbang;	1.Kesadaran yang rendah terhadap manfaat ber kb 2.Ketidakmerataan akses pendidikan dan kesehatan reproduksi. 3.Masih rendahnya angka partisipasi keluarga dalam program KB di daerah tertentu.	1.Pemahaman yang rendah tentang manfaat kb dan hambatan budaya, serta ketidakmerataan akses informasi dan layanan yang menyebabkan rendahnya partisipasi	1.Lonjakan jumlah penduduk	1.Upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengendalian penduduk, keluarga berencana dengan mengatasi masalah stunting, ketahanan keluarga, dan pendewasaan usia perkawinan 2. Cakupan peserta KB aktif dan peserta baru belum optimal, terutama pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan DPPKB	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
						3.Perkawinan dini berdampak pada meningkatnya risiko stunting, kesehatan ibu-anak, dan tingginya angka kemiskinan. 4. Belum optimalnya integrasi program Bangga Kencana dengan percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas keluarga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2024-2025, penurunan prevalensi stunting termasuk salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi Kesehatan yang mana target nasional penurunan prevalensi stunting ditetapkan sebesar 18,8 % di Tahun 2025, 14,2 % di Tahun 2029, 10 % di Tahun 2034 7,1 di Tahun 2039 dan 5% di tahun 2045 serta guna memastikan Pemerintah Daerah tetap melaksanakan upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) terkonvergen.

1. Pembangunan Keluarga Berkualitas:

Membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing, melalui berbagai program seperti advokasi, peningkatan akses KB, serta pembentukan karakter keluarga.

2. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola:

Isu ini mencakup upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran berisiko, serta meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan.

3. Pemenuhan Layanan Dasar:

Fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi, terutama bagi keluarga dan anak-anak.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan keluarga, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

5. Bonus Demografi:

Memanfaatkan bonus demografi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap bersaing dan berkontribusi positif bagi pembangunan.

6. Persebaran Penduduk yang Tidak Merata:

Mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata, melalui berbagai program seperti transmigrasi produktif dan pembangunan kawasan baru.

7. Peningkatan usia harapan hidup Kota Bekasi menyebabkan jumlah penduduk usia lanjut cukup banyak di kota Bekasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Terkait dengan penjabaran tujuan dan sasaran Kota Bekasi maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sebagai berikut :

3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pada Rancangan Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, maka dirumuskan tujuan yaitu sesuai dengan Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Ketangguhan Keluarga** dengan indikator **Indeks pembangunan Keluarga (Ibangga)**

Ibangga Adalah merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Dengan ini tentu saja pembangunan manusia dan kebudayaan akan menjadi terukur, di samping indeks pembangunan manusia atau indeks pembangunan yang lain. Dengan adanya iBANGGA akan semakin menyempurnakan standar pengukuran dalam pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

Tujuan IBANGGA:

- Memantau keberhasilan program Bangga Kencana secara lebih efektif.
- Mengukur kualitas keluarga di Indonesia dalam aspek kesejahteraan fisik, sosial, ekonomi, dan psikososial.
- Membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil kebijakan berbasis data yang akurat

Beberapa aspek yang diukur dalam IBANGGA meliputi :

1. **Ketahanan Keluarga** (fisik, ekonomi, dan sosial).
2. **Kesehatan Reproduksi**: Termasuk penggunaan KB, kualitas kesehatan ibu dan anak.
3. **Pendidikan**: Terutama dalam aspek pendidikan anak dan keterampilan orang tua.

4. **Pemberdayaan Ekonomi:** Fokus pada peran keluarga dalam kegiatan ekonomi dan kewirausahaan.
5. **Fungsi Sosial dan Psikologis:** Meliputi kualitas hubungan keluarga, pengelolaan konflik, dan peran keluarga dalam mendidik anak-anak.

IPBK dikembangkan untuk mengintegrasikan aspek kependudukan ke dalam kebijakan Pembangunan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup Masyarakat dengan skala 0-100 dan nilainya yang semakin tinggi menunjukkan pembangunan yang semakin baik dalam hal memperhatikan aspek kependudukan dan hal hal yang diperhatikan dalam IPBK aspek 5 dimensi yaitu partisipasi, keberlanjutan, pemihakan, integrasi, dan kesetaraan. IPBK (Indeks Pembangunan Keluarga) dari BKKBN memiliki 5 dimensi utama, yaitu :

1. **Partisipasi**

→ Mengukur sejauh mana keluarga ikut aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan masyarakat.

2. **Keberlanjutan**

→ Menilai kemampuan keluarga dalam menjaga kondisi kehidupan yang layak, termasuk aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3. **Pemihakan**

→ Menggambarkan adanya keberpihakan pada keluarga yang rentan, miskin, dan membutuhkan perhatian khusus agar tidak tertinggal.

4. **Integrasi**

→ Menunjukkan keterpaduan berbagai aspek pembangunan keluarga dengan sektor lain (pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya).

5. **Kesetaraan**

→ Mengukur keadilan dan kesamaan kesempatan dalam keluarga maupun masyarakat, termasuk kesetaraan gender, akses layanan, dan hak-hak anggota keluarga.

Dengan demikian Tujuan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **Meningkatnya Ketangguhan Keluarga.**

3.2 Sasaran

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025–2029 mempunyai sasaran yaitu :

1. Terwujudnya Keluarga Berkualitas
 2. Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pengelolaan dan Pelayanan
- Dengan Indikator :

1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
2. Nilai APIP

Strategi atau langkah langkah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 :

1. Pemahaman Visi dan Misi:

Memastikan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yaitu dengan Visi Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menjalankan Misi ke 2 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan.

2. Analisis Lingkungan:

Melakukan Analisa lingkungan internal dan eksternal dimana Analisa ini akan membantu mengidentifikasi faktor faktor yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dan membantu merumuskan strategi yang tepat

3. Perumusan Tujuan dan Sasaran:

Menetapkan tujuan strategis yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu yaitu terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis menjadi sasaran yang lebih konret dan terukur

4. Penyusunan Program dan Kegiatan:

Merencanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan yaitu Indeks Kemandirian Keluarga.

5. Alokasi Sumber Daya:

Mengidentifikasi dan alokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan, meliputi anggaran (bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tenaga kerja, peralatan, dan lain-lain

6. Implementasi dan Pemantauan:

Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun, memantau kemajuan pelaksanaan secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan melakukan evaluasi untuk mengukur pencapaian target dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki

7. Evaluasi dan Penyesuaian:

Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan lingkungan.

8. Komunikasi dan Partisipasi:

Memastikan komunikasi yang efektif terkait isi Renstra kepada seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dan pemangku kepentingan lainnya dengan melibatkan pada saat proses penyusunan dan implementasi Renstra untuk mendapatkan dukungan dan masukan.

Dalam menjalankan strategi pencapaian tujuannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi juga melakukan :

A. Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan dan perkembangan perubahan yang akan terjadi sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengacu dalam peyeleggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai daya ungkit dalam pencapaian tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Didalam RPJMD Kota Bekasi Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menjalankan tujuan ke 2 yaitu terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis yang mengandung arti bahwa SDM Kota Bekasi sebagai bagian kawasan aglomerasi diharapkan memiliki budaya yang maju, adaptif, kompetitif, toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika serta kearifan lokal.

Ibanga sebagai Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada tujuan ini yaitu untuk memberikan arahan, mengukur kinerja serta menjadi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana secara terarah dan akuntabel dalam waktu lima tahun.

B. Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan dan perkembangan perubahan yang akan terjadi sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengacu dalam peyeleggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam

mendukung Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai daya ungkit dalam pencapaian tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Didalam RPJMD Kota Bekasi Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menjalanka tujuan ke 2 yaitu terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis yang mengandung arti bahwa SDM Kota Bekasi sebagai bagian kawasan aglomerasi diharapkan memiliki budaya yang maju, adaptif, kompetitif, toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika serta kearifan lokal.

Ibanga sebagai Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada tujuan ini yaitu untuk memberikan arahan, mengukur kinerja serta menjadi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana secara terarah dan akuntabel dalam waktu lima tahun.

Di dalam RPJMD Kota Bekasi juga di susun program prioritas untuk mencapai tujuan yang disebut **Sapta Program** dimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi berada pada program Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE SEHAT**) dan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi yang berhubungan dengan Gerakan Kobe Sehat yaitu penyediaan sekolah lansia.

Meskipun pembangunan di bidang kependudukan di Kota Bekasi telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, dditunjukkan dengan capaian indeks pembangunan keluarga yang cukup tinggi (angka 64,92) namun secara umum situasi dan kondisi kependudukan masih perlu ditingkatkan kualitasnya dimana wilayah Kota Bekasi tiap tahun menjadi tujuan bagi para pendatang baru.

C. Telaah Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, ke depan Kota Bekasi berupaya melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam tumbuh kembang balita, pembinaan

remaja, pembinaan lansia dan pembinaan lingkungan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Pembinaan Lansia kelompok sasaran yang didasari oleh Jumlah penduduk kota Bekasi yang banyak berkisar antara 10% -11% dari total jumlah penduduk diharapkan Lansia yang ada di Kota Bekasi adalah Lansia Tangguh yaitu Lansia yang mampu beradaptasi secara positif terhadap proses penuaan, sehingga tetap sehat, mandiri, aktif, kreatif, responsif, dan terampil. Mereka menjalani kehidupan yang berkualitas, nyaman, aman, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, serta lingkungan. Lansia tangguh juga mampu menjaga kesehatan fisik, sosial, dan mental mereka.

3. Peningkatan pendapatan keluarga khususnya keluarga Pra sejahtera dan KS melalui UPPKS
4. Meningkatkan kualitas reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan generasi yang lebih baik, melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
5. Memperkuat kelembagaan dan jaringan KB dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di lapangan akan sangat memperhatikan kondisi daerah, diantaranya meliputi :

1. Memberikan peluang pengembangan keragaman pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan program.
 2. Memadukan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan berbagai program pembangunan lainnya untuk mencapai hasil optimal bagi masyarakat luas.
 3. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama sinergis dengan semua pihak dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
 4. Mengoptimalkan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pengembangan potensi yang tersedia.
 5. Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan untuk memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat.
 6. Memperhatikan pelayanan untuk keluarga melalui penggarapan kampung KB.
- D. Telaahan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Rancangan Rencana Strategis

K/L ataupun Rancangan Rencana Strategis PD provinsi. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN 2025-2029 sejalan dengan RPJMN yang ditetapkan dengan peraturan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.

Adapun garis besar Rancangan Rencana Strategis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tujuan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN memiliki tujuan untuk:

- a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

2. Sasaran Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Untuk menjamin dukungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2024-2028, serta untuk memastikan tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN yang telah ditetapkan, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2024 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2029.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2024 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2029.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2024 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2029.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2024 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2029.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2024 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2029.

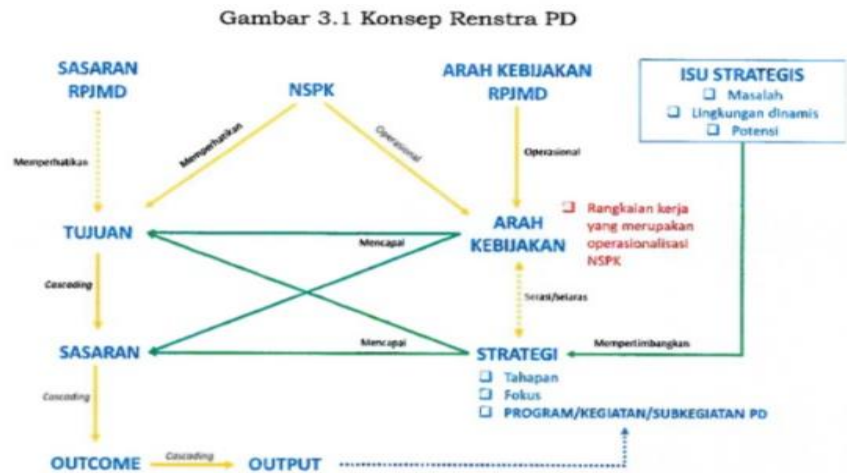
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2024 dan menjadi 22,1 tahun pada 2029.

Setelah melakukan telaah dari semua tingkatan kebijakan maka ditentukan isu Strategis yang digambarkan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Adapun isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengendalian penduduk, keluarga berencana dengan mengatasi masalah stunting, ketahanan keluarga, dan pendewasaan usia perkawinan.
2. Cakupan peserta KB aktif dan peserta baru belum optimal, terutama pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
3. Perkawinan dini berdampak pada meningkatnya risiko stunting, kesehatan ibu-anak, dan tingginya angka kemiskinan.
4. Belum optimalnya integrasi program Bangga Kencana dengan percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas keluarga.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah atau hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Rancangan Rencana Strategis periode tahun sebelumnya. Berikut adalah isu strategis terkait perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi adalah **Indek pembangunan keluarga (I Bangga)** yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat, serta untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

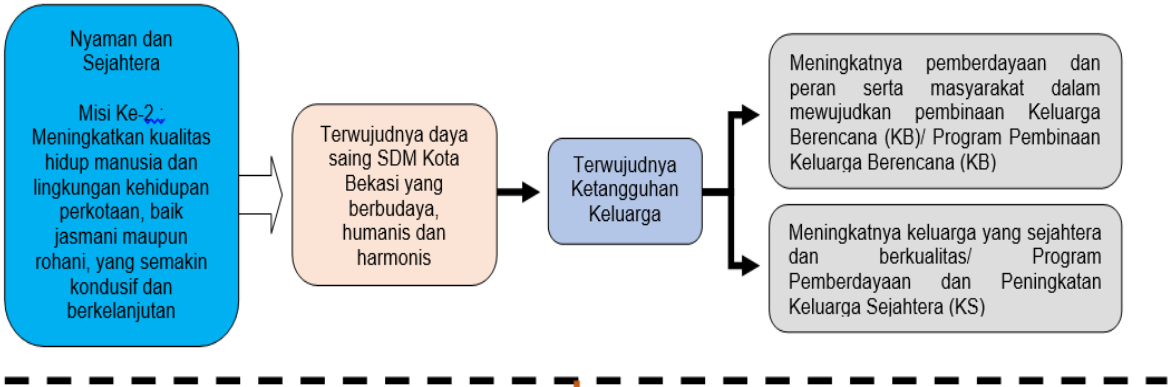
Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



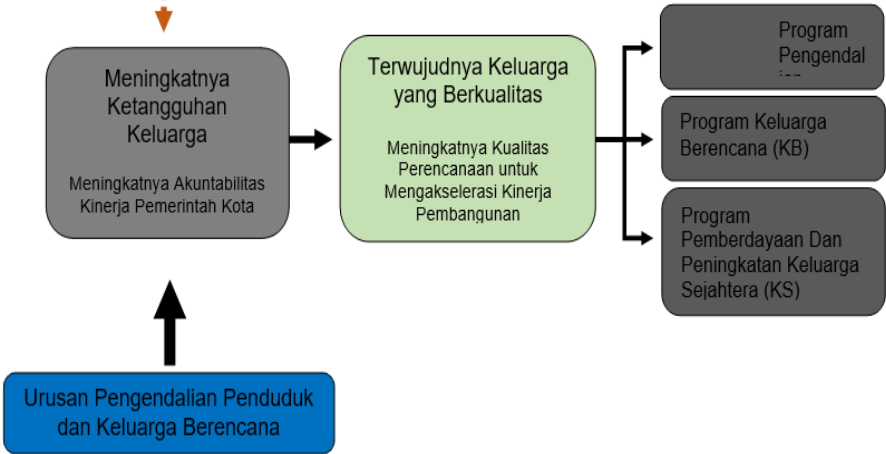
Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra DPPKB Kota Bekasi

RPJMD



RENSTRA



Tabel 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Ketangguhan Keluarga	Meningkatnya Ketangguhan Keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga	65.50	66.00	66.50	67.00	67.50	68.00	
		Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	68.10	69.10	70.10	71.10	72.10	73.10	

Dalam Pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Penahapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dapat disajikan seperti table di bawah :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra DPPKB Kota Bekasi

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
Kesehatan Reproduksi	Kesehatan Reproduksi	Kesehatan Reproduksi	Kesehatan Reproduksi	Kesehatan Reproduksi
Pendidikan dan Kesehatan Lansia	Lansia Berdaya	Infrastrktur dan kenyamanan untuk lansia	Lansia bekerja	Lansia SMART (Sehat, Mandiri, aktif dan produktif)
UPPKA	Aplikasi untuk peningkatan layanan public berbasis digital	Inovasi	Perluasan Pasar Produk UPPKA	Kegiatan Berkesinambungan dari tahun 2025-2029
Pengendalian penduduk	Pemuktahiran data	Pemberdayaan	Monitoring	Evaluasi

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

Tabel. 3.3.

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1.	Terkendalinya Jumlah Penduduk menuju keluarga yang tangguh dan berkualitas	1. Penciptaan lingkungan perkotaan yang asri, nyaman dan berestetika 2. Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan mencakup industri dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja 4. Peningkatan penempatan tenaga kerja 5. Percepatan penanganan prevalensi gizi kurang dengan melibatkan peran aktif perempuan (PKK) dan kelembagaan masyarakat setempat 6. Peningkatan ketangguhan keluarga, pemenuhan hak anak, dan penerapan pembangunan berperspektif gender	1. Tersedianya fasilitas ramah lansia 2. Tersedianya fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif bagi kelompok aseptor dan lansia 3. Fasilitasi Kegiatan pelatihan bagi keluarga aseptor dan lansia 4. Fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi kelyarga aseptor dan lansia 5. Advokasi dan edukasi KIE 6. Kampanye tentang keluarga sejahtera, KTD, Pernikahan usia Dini, 7. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif	

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang disusun sebagai bentuk operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Arah kebijakan ini dirancang agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta mendukung strategi pembangunan daerah dalam mewujudkan keluarga berkualitas, pengendalian penduduk yang berkelanjutan, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Arah Kebijakan Renstra DPPKB Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang disusun sebagai bentuk operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Arah kebijakan ini dirancang agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta mendukung strategi pembangunan daerah dalam mewujudkan keluarga berkualitas, pengendalian penduduk yang berkelanjutan, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, arah kebijakan Renstra DPPKB 2025–2029 tidak hanya menjadi pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan daerah sesuai visi dan misi kepala daerah.

Tabel 3.4
Target Kinerja 2025-2030
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Kota Bekasi

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	100	100	100	100	100
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	86,5	87,5	87,8	87,92	88	88,2	88,5
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85,31	86,00	86	86,05	86,05	86,05	86,10
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	100	100	100	100	100

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)									
Outcome: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	95%
	Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	%	5,6 (baseline BKKBN 2023)	6	6	8	10	12	14
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)									
Outcome: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	50	55	56	59	61	61,5	62
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	18,5	14	13	12	11,5	11	10
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	25,67	25,17	24,67	24,17	23,67	23,17	22,67
Program Pengendalian Penduduk									
Outcome: Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	%	1,81	1,80	1,79	1,78	1,77	1,76	1,75
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)	%	5,2	5	4,95	4,9	4,85	4,8	4,75

3.3 Strategi DPPKB Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA DPPKB

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan strategis agar selaras dengan Rancangan RPJMD Kota Bekasi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada tahun 2025-2029 dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peranan penting dalam mendorong tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam Tupoksi Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian mengenai kondisi umum masa kini dan kondisi lima tahun ke depan yang diinginkan yang dijadikan dasar dalam menentukan keberlanjutan pembangunan Kota Bekasi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029 pada Misi Ke -2 (dua) **Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia dan lingkungan Kehidupan Perkotaan Baik Jasmani Maupun Rohani, Yang makin Kondusif Dan Berkelanjutan.** sasaran Indeks Pembangunan Keluarga.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam Rancangan RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029 yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi adalah Gini Ratio, mempunyai tujuan

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan responsif gender, indikator kinerja indek pembangunan keluarga, strategi yang digunakan adalah memfasilitasi pembangunan keluarga ber-wirausaha dengan kerjasama antar pihak, arah kebijakan penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif

Terkait dengan misi tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah **Meningkatnya Ketangguhan Keluarga** dengan cara lain :

1. **Peningkatan Kualitas Perencanaan Kehidupan Berkeluarga**
 - o Mendorong remaja dan calon pasangan usia subur untuk mengikuti program edukasi dan konseling pranikah.
 - o Memperkuat peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
2. **Penguatan Program Bangga Kencana**
 - o Meningkatkan kesertaan dan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi modern.
 - o Memperluas cakupan pelayanan KB yang merata dan terjangkau.
3. **Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**
 - o Mengembangkan usaha ekonomi produktif keluarga melalui kelompok UPPKSA(Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).
 - o Fasilitasi akses keluarga ke lembaga keuangan dan pelatihan keterampilan.
4. **Penguatan Ketahanan Sosial dan Mental Spiritual**
 - o Membina keluarga dalam nilai-nilai agama, budaya, dan gotong royong.
 - o Peningkatan fungsi komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga.
5. **Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi**
 - o Memperluas layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita.
 - o Pencegahan pernikahan dini, stunting, dan kekerasan dalam rumah tangga.
6. **Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi**
 - o Mengoptimalkan pendataan keluarga dan pemutakhiran data secara berkala.
 - o Memanfaatkan digitalisasi untuk layanan, edukasi, dan pemantauan keluarga.
7. **Kemitraan dan Kolaborasi**
 - o Memperkuat sinergi dengan perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.
 - o Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kader PKK dalam program pemberdayaan keluarga.
- a. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan mewujudkan keluarga sejahtera dengan Indikator yaitu:

 - Presentasi keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga
 - Persentase Lansia yang mendapatkan pendampingan
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)

Dengan Indikator yaitu:

- Angka prevalensi kontrasepsi Modern/ModernContraceptive (mCPR);
- Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) yaitu wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi.
- Presentasi kehamilan yang tidak direncanakan (KTD)

c. Program Pengendalian Penduduk

Persentase cakupan data mikro keluarga

Dengan Indikator yaitu:

- Angka Kelahiran Total (Total Fertility rate /TFR)
- Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun (Age Spesific fertility rate / ASFR 15-19)

3.4. Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bekasi adalah :

Arah kebijakan dan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2025-2029. Adapun arah kebijakan dan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan PKB dan PLKB serta PPKBD
2. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
 - Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
3. Pengutan pemahaman 8 fungsi keluarga;
4. meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana dengan penyebarluasan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang KB dan 8 fungsi keluarga;
5. Melakukan pelayanan KB yang bekerjasama dengan sektor terkait;
6. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan UPPKA;
7. Penambahan PPKS Aktif di Kecamatan.

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPPKB Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Ketangguhan Keluarga	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Perencanaan Kehidupan Berkeluarga - Mendorong remaja dan calon pasangan usia subur untuk mengikuti program edukasi dan konseling pranikah. - Menguatkan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Penguatan Program Bangga Kencana - Meningkatkan kesertaan dan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi modern. - Memperluas cakupan pelayanan KB yang merata dan terjangkau. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga - Mengembangkan usaha ekonomi produktif keluarga melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). - Fasilitasi akses keluarga ke lembaga keuangan dan pelatihan keterampilan. Penguatan Ketahanan Sosial dan Mental Spiritual - Membina keluarga dalam nilai-nilai agama, budaya, dan gotong royong. - Peningkatan fungsi komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga.	- Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan Ber-KB - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - Pendayagunaan Tenaga penyuluha KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PKLB) - Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB - Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan lokal - Pelaksanaan Pembangaunan keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga. - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		5. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi • Memperluas layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita. • Pencegahan pernikahan dini, stunting, dan kekerasan dalam rumah tangga. 6. Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi • Mengoptimalkan pendataan keluarga dan pemutakhiran data secara berkala. • Memanfaatkan digitalisasi untuk layanan, edukasi, dan pemantauan keluarga. 7. Kemitraan dan Kolaborasi • Memperkuat sinergi dengan perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. • Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kader PKK dalam program pemberdayaan keluarga	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BEKASI

Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah diuraikan tersebut akan di implementasikan kedalam program dan kegiatan, dimana program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 memprioritaskan indikator Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh Kota Bekasi. Untuk menjamin penggarapan Program, Kegiatan Prioritas dan Sub Kegiatan yang disusun dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diimplementasikan secara baik.

Berdasarkan prioritas Program/Kegiatan RPJMD Pemerintah Kota Bekasi dan mengacu pada nomenklatur yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Pemutakhirannya. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang direncanakan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi setelah dilakukan persamaan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang pekerjaan yang akan dilakukan, penajaman terhadap maksud dan tujuan, penyamaan persepsi tentang beberapa konsep pokok, dan pembatasan ruang lingkup kerja dan penjadwalan pelaksanaan pokok yang disesuaikan dengan tuntutan arah dan perkembangan organisasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menyusun program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun ke depan dengan uraian yang dijabarkan dalam matriks. Berikut adalah program dan kegiatan di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029 yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kinerja dan Pendanaan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				16,946,874,343		18,034,115,875.00		19,467,308,158.00		19,977,509,848.00		20,328,389,215.00		20,790,019,333.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				13,218,840,375		15,357,823,875		15,664,980,353.00		15,978,279,960.00		16,138,062,759.00		16,299,443,378.00
	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	6,612,500.00	100%	7,604,375.00	100%	8,745,031.00	100%	10,056,785.00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	5 Laporan	100	5,000,000	5 laporan	5,000,000	5 laporan	6,612,500.00	5 laporan	7,604,375.00	5 laporan	8,745,031.00	5 laporan	10,056,785.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian hasil kinerja dan ihtisar realisasi konerja SKPD	5 laporan	5 laporan	5,000,000	5 laporan	5,000,000.00	5 laporan	6,612,500.00	5 laporan	7,604,375.00	5 laporan	8,745,031.00	5 laporan	10,056,785.00
	Persentase Capaian kinerja keuangan penunjang urusan	86.5%	87.5%	11,795,343,000	87.8%	14,445,558,875	87.9%	14,838,672,078.00	88%	15,065,075,796.00	88.2%	15,128,633,357.00	88.5%	15,269,710,841.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	100	11,795,343,000	6 laporan	13,307,701,000	6 laporan	13,657,554,203.00	6 laporan	13,793,957,921.00	6 laporan	13,847,515,482.00	6 laporan	13,834,710,841.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1 Laporan	1372 orang/ bulan	11,790,343,000	1372 orang/ bulan	13,302,701,000	1372 orang/ bulan	13,652,554,203.00	1372 orang/ bulan	13,788,957,921.00	1372 orang/ bulan	13,842,515,482.00	1372 orang/ bulan	13,829,710,841.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	100	560,594,875	18 laporan	782,857,875	18 laporan	850,592,875.00	18 laporan	940,592,875.00	18 laporan	950,592,875.00	18 laporan	1,030,000,000.00
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik barang yang disediakan	1 Laporan	2 paket	400,000,000	2 paket	422,857,875.00	2 paket	550,000,000.00	2 paket	550,000,000.00	2 paket	550,000,000.00	2 paket	550,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Laporan	2 paket	20,592,875	2 paket	50,000,000.00	2 paket	20,592,875.00	2 paket	20,592,875.00	2 paket	20,592,875.00	2 paket	50,000,000.00
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	1 Laporan	12 laporan	60,000,000	12 laporan	60,000,000.00	12 laporan	60,000,000.00	12 laporan	60,000,000.00	12 laporan	60,000,000.00	12 laporan	60,000,000.00
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan kosultasi SKPD	1 Laporan	12 laporan	43,820,000	12 laporan	200,000,000.00	12 laporan	170,000,000.00	12 laporan	250,000,000.00	12 laporan	250,000,000.00	12 laporan	300,000,000.00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	36,182,000	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	70,000,000.00	1 Dokumen	70,000,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 Laporan	100	754,438,142	100	355,000,000	100	330,525,000.00	100	330,525,000.00	100	330,525,000.00	100	405,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	12 laporan	55,000,000	12 laporan	55,000,000.00	12 laporan	55,000,000.00	12 laporan	55,000,000.00	12 laporan	55,000,000.00	12 laporan	55,000,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	12 laporan	699,438,142	12 laporan	300,000,000.00	12 laporan	275,525,000.00	12 laporan	275,525,000.00	12 laporan	275,525,000.00	12 laporan	350,000,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	85.31%	86.00%	620,094,875	86%	85,000,000	86.05%	78,688,750.00	86.05%	90,492,062.00	86.05%	104,065,871.00	86.10%	119,675,752.00
Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	2 Laporan	100	59,500,000	10 orang	85,000,000	10 orang	78,688,750.00	10 orang	90,492,062.00	10 orang	104,065,871.00	10 orang	119,675,752.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	1 Laporan	10 orang	59,500,000	10 orang	55,000,000.00	10 orang	78,688,750.00	10 orang	55,000,000.00	10 orang	54,065,871.00	10 orang	69,675,752.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Laporan	0	-	0	30,000,000.00	60 Orang	-	60 Orang	35,492,062.00	60 Orang	50,000,000.00	60 Orang	50,000,000.00
	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	100%	100%	798,402,500	100%	822,265,000	100%	741,007,025.00	100%	815,107,727.00	100%	896,618,500.00	100%	900,000,000.00
Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	100	45,932,500	100	32,265,000	100	51,007,025.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	60,000,000.00
Penggadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Laporan	16 Unit	45,932,500	16 Unit	32,265,000.00	22 Unit	51,007,025.00	22 Unit	50,000,000.00	26 Unit	50,000,000.00	26 Unit	60,000,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Laporan	100	752,470,000	100	790,000,000	100	690,000,000.00	100	765,107,727.00	100	846,618,500.00	100	840,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Laporan	5 unit	392,730,000	5 unit	250,000,000.00	5 unit	250,000,000.00	5 unit	305,107,727.00	5 unit	386,618,500.00	5 unit	350,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Laporan	60 unit	222,000,000	60 unit	250,000,000.00	60 unit	250,000,000.00	60 unit	250,000,000.00	60 unit	250,000,000.00	60 unit	250,000,000.00
Pemeliharaan dan peralatan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Laporan	40 unit	46,740,000	40 unit	40,000,000.00	50 unit	40,000,000.00	50 unit	60,000,000.00	50 unit	60,000,000.00	50 unit	90,000,000.00
Pemeliharaan/rehabilit as Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitas	1 Laporan	12 unit	91,000,000	12 unit	250,000,000.00	12 unit	150,000,000.00	12 unit	150,000,000.00	12 unit	150,000,000.00	12 unit	150,000,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengendalian Penduduk	Persentase cakupan data mikro keluarga	100%	85	220,725,800	1 laporan	300,000,000	1 laporan	315,540,000.00	1 laporan	333,715,104.00	1 laporan	350,801,317.00	1 laporan	369,604,268.00
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (AGE Specific ferlity rate/ASFR 15-19)	5.2	5%		4.95%		4.90%		4.85%		4.80%		4.75%	
	Angka kelahiran total (Total ferlity rate / TFR)	1.81	1.80%		1.79%		1.78%		1.77%		1.76%		1.75%	
Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah Dokumen Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	4 Dokume n	1,8	97,000,000	1 laporan	200,000,000.00	1 laporan	240,540,000.00	1 laporan	258,715,104.00	1 laporan	275,801,317.00	1 laporan	280,000,000.00
Penyusunan dan Pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/kota	1 Dokume n	0	97,000,000	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Advokasi,sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaaan Pendidikan kependudukan jalur formal di satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS,serta Jaluar Non formal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur formal di satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS,serta Jaluar Non formal dan Informal	1 Dokume n	-	-	1 laporan	50,000,000.00	1 laporan	75,000,000.00	1 laporan	75,000,000.00	1 laporan	85,801,317.00	1 laporan	90,000,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sosialisasi pembangunan berwawasan kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima sosialisasi pembangunan berwawasan kependudukan (PBK) dan alat ukurnya indeks Pembangunan berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	-	-	22 PD	100,000,000.00	22 PD	90,000,000.00	22 PD	83,715,104.00	22 PD	90,000,000.00	22 PD	90,000,000.00
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Dokumen					1 Kegiatan	75,540,000.00	1 Kegiatan	100,000,000.00	1 Kegiatan	100,000,000.00	1 Kegiatan	100,000,000.00
Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Terlaksana nya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	100	123,725,800	1 laporan	100,000,000	1 laporan	75,000,000.00	1 laporan	75,000,000.00	1 laporan	75,000,000.00	1 laporan	89,604,268.00
Penyediaan dan informasi keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedianya	1 Laporan	1 Dokumen	48,965,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengolahan dan Pelaporan data pengendalian dan pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Dokumen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan dan operasionalisasi rumah data dan kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program bangsa kencana disektor lain	Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB yang efektif yang memperkuat integrasi program bangsa kencana (Pembangunan keluarga,kependudukan dan keluarga berencana) disektor lain yang dibentuk	1 Laporan	44 Unit	74,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya system peringatan dini pengendalian penduduk	1 Laporan			1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	75,000,000.00	1 laporan	75,000,000.00	1 laporan	75,000,000.00	1 laporan	89,604,268.00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				2,272,063,168		1,299,475,000		1,366,787,805.00		1,445,514,784.00		1,519,525,139.00		1,600,971,687.00
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	50%	55%		56%		59%		61%		61.50%		62%	
	Presentasi kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneet)	18.50%	14%		13%		12%		11.50%		11%		10%	
	presentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	25.67%	25.17%		24.67%		24.17%		23.67%		23.17%		22.67%	
Pelaksa an advokasi, komunikasi,informas i dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai ke arifan budaya lokal	Jumlah Dokumen elaksa an advokasi, komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai ke arifan budaya lokal	3 Dokumen	55	555,005,168.00	3 laporan	299,475,000.00	3 laporan	575,000,000.00	3 laporan	721,039,784.00	3 laporan	695,050,139.00	3 laporan	725,000,000.00
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	1 Laporan	-	-	1 laporan	-	1 laporan	175,000,000.00	1 laporan	175,000,000.00	1 laporan	175,000,000.00	1 laporan	175,000,000.00
Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program bangga kencana (pembangunan keluarga,kependudukan,d an keluarga berencana) melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	74,926,168.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Komunikasi informasi dan edukasi KIE program bangga kencana sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah komunikasi, informasi dan edukasi KIE program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) sesuai kearifan budaya lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	480,079,000.00	1 Dokumen	249,475,000.00	1 Dokumen	250,000,000.00	1 Dokumen	396,039,784.00	1 Dokumen	370,050,139.00	1 Dokumen	400,000,000.00
Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksana nya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	2 Dokumen	100	251,770,000.00	250 orang	200,000,000.00	250 orang	100,000,000.00	250 orang	100,000,000.00	250 orang	100,000,000.00	250 orang	100,000,000.00
Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader intitusi masyarakat pedesaan (IMP)	1 Laporan	309 Orang	251,770,000.00	-	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan IMP dan Program bangga kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program bangga kencana (pembangunan keluarga,kependudukan,d an keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB	1 Laporan	1 Organisasi	-	10 organisasi	-	10 organisasi	100,000,000.00	10 organisasi	100,000,000.00	10 organisasi	100,000,000.00	10 organisasi	100,000,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Terlaksana nya pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrsepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota tercapai nya penurunan presentase kehamilan tidak di rencanakan (KTD)	5 Dokumen	14 25,17 55	1,465,288,000.0 0		800,000,000.00		691,787,805.00		624,475,000.00		724,475,000.00		775,971,687.00
Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	1 Laporan	4.646 Orang	714,588,000.00	1314	450,000,000.00	1314	491,787,805.00	1314	524,475,000.00	1314	524,475,000.00	1314	575,971,687.00
Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana Kesehatan reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi	1 Laporan	24 Orang	145,200,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan kesertaan KB pria	Jumlah akseptor yang mendapat peningkatan kesetaraan KB pria	1 Laporan	80 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu panca persalinan	Jumlah pemerintah daerah yang melakukan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan	1 Laporan	1 Kab/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

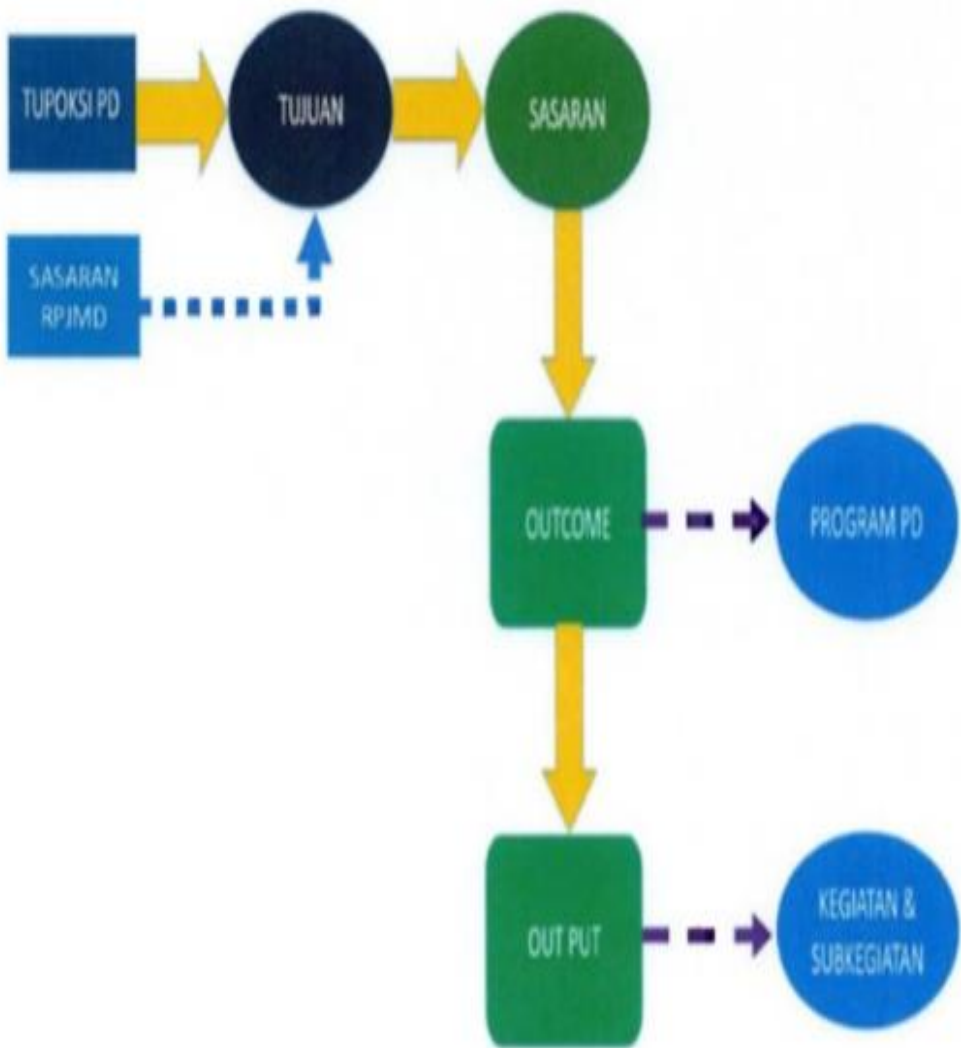
BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Promosi dan konseling KB pasca persalinan	Jumlah orang yang mengikuti promosi dan konseling KB pasca persalinan	1 Laporan	510 Orang	75,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	Terlaksana nya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	2 Dokumen	100	265,250,000.00	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100.000.000	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
Fasilitas pengelolaan dapur sehat atasi stunting (Dashat) di kampung keluarga berkualitas	Jumlah dahsat di kampung KB	1 Dokumen	56 Unit	265,250,000.00		100,000,000.00								
Pelaksanaan dan Pengelolaan Peran serta organisasi kemsyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaa ber-kb	Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga,kependudukan,d an keluarga berencana)	1 Dokumen	-	-	10 kampung KB	-	10 kampung KB	100,000,000.00	10 kampung KB	100,000,000.00	10 kampung KB	100,000,000.00	10 kampung KB	100,000,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase cakupan anggota poktan yang ber-KB	100%	65	1,235,245,000	65	1,076,817,000.00	65	2,120,000,000.00	65	2,220,000,000.00	65	2,320,000,000.00	65	2,520,000,000.00
	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	40%	50%		60%		70%		80%		90%		95%	
	Presentase lansia yang mendapatkan pendampingan terlaksana nya pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga	5.60%	6%		6%		8%		10%		12%		14%	
Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Laporan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	6 Laporan		1,235,245,000		976,817,000.00		1,920,000,000.00		2,020,000,000.00		2,120,000,000.00		2,320,000,000.00
Penggadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor) (UPPKA)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK -R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor) (UPPKA) yang tersedia	1 Laporan	108 Unit	417,192,000		-		200,000,000.00		320,000,000.00		220,000,000.00		300,000,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor) (UPPKA)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor) (UPPKA)	1 Laporan	1 Laporan	782,730,000		100,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		220,000,000.00
Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)	Jumlah Kader pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)	1 Laporan	5.877 Orang	35,323,000		-		220,000,000.00		350,000,000.00		350,000,000.00		350,000,000.00
Pembentukan dan operasional sekolah lansia di kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	1 Laporan			13 kegiatan	476,817,000.00	13 kegiatan	800,000,000.00	13 kegiatan	800,000,000.00	13 kegiatan	800,000,000.00	13 kegiatan	950,000,000.00
Penyediaan dan pengembangan materi ibangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah dokumen hasil penyediaan dan pengembangan materi ibangga (indeks pembangunan keluarga)	1 Laporan			1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	1 Laporan			12 Kelompok	100,000,000.00	12 Kelompok	300,000,000.00	12 Kelompok	200,000,000.00	12 Kelompok	300,000,000.00	12 Kelompok	300,000,000.00
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/B alita)	1 Dokumen			1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00
Pemantauan data Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Cakupan Pemantauan data Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	1 Dokumen			1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4.2.

Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPPKB Kota Bekasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Meningkatnya Ketangguhan Keluarga	Meningkatnya Ketangguhan Keluarga	Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) 2.Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	<i>Program:</i> Pembinaan Keluarga Berencana <i>Kegiatan:</i> 1.Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan local 2. pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsiserta pelaksanaan pelayanan kb di daerah kabupten/kota Sub Kegiatan : 1. Pengendalian Program KKBPK 2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Gerakan Kobe Besinergi
			Meningkatnya Keluarga yang sejahtera dan Berkualitas	Jumlah Keluarga yang sejahtera dan Berkualitas	1.Dimensi Kebahagiaan 2.Dimensi Kemandirian 3.Dimensi Ketentraman	<i>Program:</i> Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera <i>Kegiatan:</i> 1.pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Sub Kegiatan : 1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Gerakan Kobe Besinergi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Program : Pengendalian Penduduk Kegiatan: 1. Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 2. Pemetaan prakiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kab/kota Sub Kegiatan : 1. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 2. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	

Tabel. 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas (Sapta Program) dalam mendukung Program Prioritas Daerah DPPKB Kota Bekasi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEG/ SUB KEG	TARGET				
1	2	3	4	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pembinaan Keluarga Berencana (KB) KUBE BERSINERGI	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembinaan keluarga berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahter (KS)	Meningkatnya keluarga sejahtera dan berkualitas	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Lansia Tangguh	Terfasilitasinya Sekolah Lansia	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	100%	100%	100%	100%	100%

Sesuai dengan Visi Kota Bekasi yang nyaman Sejahtera, Kota Bekasi melakukan segala Upaya melakukan salah satu misinya yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi melalui program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) menjadikan masyarakat lanjut usia (Lansia) sebagai salah satu kelompok sasaran yang didasari oleh Jumlah penduduk kota Bekasi yaitu 2.526.133 jiwa dengan perkiraan penduduk yang masuk kategori ini adalah berkisar antara 10% -11% (253.000 hingga 278.300 jiwa)

Dengan Jumlah yang cukup banyak ini diharapkan Lansia yang ada di Kota Bekasi adalah Lansia Tangguh yaitu Lansia yang mampu beradaptasi secara positif terhadap proses penuaan, sehingga tetap sehat, mandiri, aktif, kreatif, responsif, dan terampil. Mereka menjalani kehidupan yang berkualitas, nyaman, aman, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, serta lingkungan. Lansia tangguh juga mampu menjaga kesehatan fisik, sosial, dan mental mereka.

Lansia Tangguh akan menurunkan biaya beban sosial terutama dari biaya Kesehatan karena akan mengurangi biaya perawatan penyakit komplikasi yang dialami Lansia. Dengan usia harapan hidup yang tinggi di kota Bekasi (76,14 tahun) Lansia Kota Bekasi perlu diberikan wadah salah satunya melalui sekolah Lansia yang tentu saja memerlukan dukungan baik secara kebijakan maupun pendanaan.

Tabel 4.4.

Matriks Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2025-2029
Berdasarkan dokumen RPKD Tahun 2025-2029 dan RAT Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi
Tahun 2025

Kode Nomenklatur Kemendagri	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Nomenklatur Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Perangkat Daerah Pelaksana	Intervensi terhadap Strategi	Intervensi terhadap Arah Kebijakan
2.14.04.2.01.0028	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas diri dan keluarga	Edukasi untuk motivasi diri dan keluarga
2.13.05.2.01.0010			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas diri dan keluarga	Edukasi untuk motivasi diri dan keluarga

Kode Nomenklatur Kemendagri	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Nomenklatur Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Perangkat Daerah Pelaksana	Intervensi terhadap Strategi	Intervensi terhadap Arah Kebijakan
2.13.05.2.01.0011			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.14.04.2.01.0014			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas diri dan keluarga	Edukasi untuk motivasi diri dan keluarga
2.14.04.2.01.0020			Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.14.04.2.01.0022			Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi berkomitmen melaksanakan program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat **Rencana Pembangunan Kota Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029** dan hasil **Rapat Analisis Tematik (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025**

Tabel 4.5

Matriks Intervensi Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2025-2029
DPPKB Kota Bekasi

Kode Nomenklatur Kemendagri	Nomenklatur Urusan/ Program	Nomenklatur Kegiatan	Nomenklatur Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Intervensi
1	2	3	4	5	6	7	8
2.14.04.2.01.0024	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader)KetahanandanKesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	orang	Lingkungan Kesehatan, layanan kesehatan di posyandu yang bertujuan untuk terbangunnya keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2.14.04.2.02.0005	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	Terdatanya keluarga yang memiliki faktor risiko stunting

2.14.04.2.02.0006	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	Pemberian sosialisasi, edukasi, komunikasi dan informasi terkait stunting
-------------------	--	--	--	--	---	---------	---

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi berkomitmen melaksanakan program penanggulangan dan Penurunan Stunting secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Kota Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 dan hasil Rapat Analisis Tematik (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025.

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Utama DPPKB Kota Bekasi

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Nilai	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	
2	IPBK 2024 : 67,10	Nilai	68.10	69.10	70.10	71.10	72.10	73.10	

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) tahun 2025–2030 berfokus pada peningkatan kualitas pembangunan keluarga melalui dua ukuran utama, yaitu **Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)** dan **Indeks Pembangunan Keluarga BKKBN (IPBK)**.

Pertama, **Ibangga** ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, nilai Ibangga ditetapkan sebesar **65,50** dan terus naik dengan tren positif hingga mencapai **68,00** pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat ketahanan, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Kedua, **IPBK** yang pada tahun 2024 berada di angka **67,10**, juga ditargetkan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, nilai IPBK ditargetkan mencapai **68,10**, kemudian terus naik hingga **73,10** pada tahun 2030. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya konsisten dalam mendorong keterlibatan keluarga pada dimensi partisipasi, keberlanjutan, pemihakan, integrasi, dan kesetaraan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan keluarga.

Secara keseluruhan, kedua indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengukur keberhasilan program pembangunan keluarga di Kota Bekasi. Peningkatan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya arah kebijakan yang terukur dan berorientasi pada pencapaian kualitas keluarga yang lebih baik

Tabel 4.7.

Indikator Kinerja Kunci DPPKB Kota Bekasi

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	50	60	70	80	80	90	
2	Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	Persen	5,7	6	8	10	12	14	
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	55	56	59	61	61,5	62	
4	Persentasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(Unmet Need)	Persen	14	13	12	11,5	11	10	
5	Persentase kehamilan tidak direncanakan(KTD)	Persen	25,17	24,67	24,17	23,67	23,17	22,67	
6	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Persen	1,8	1,79	1,78	1,77	1,76	1,75	
7	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)	Persen	5	4,95	4,90	4,85	4,80	4,75	

Tabel 4.8.
Cascading DPPKB Kota Bekasi

ISI	NO	MISI	TUJUAN RPJMD 2025-2029	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD 2025- 2029	OUTCOME	INDIKATOR SASARAN RPJMD 2025- 2029	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.	TUJUAN RENSTRA OPD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD	INDIKATOR SASARAN RENSTRA OPD	OUTCOME OPD	INDIKATOR OUTCOME OPD	PROGRAM OPD	PD	
	1		2	3	5		6				8	9	10	11	12	13		14	
Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera	2.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya ketangguhan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)				Meningkatnya Ketangguhan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	- Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gerakan Kobe Bersinergi						- Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)			
							- Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)									Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gerakan Kobe Bersinergi	Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
							Meningkatnya keluarga yang sejahtera dan berkualitas	- Dimensi Kebahagiaan - Dimensi Kemandirian - Dimensi Ketenteraman											
																Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	- Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga - Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

ISI	NO	MISI	TUJUAN RPJMD 2025-2029	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD 2025- 2029	OUTCOME	INDIKATOR SASARAN RPJMD 2025- 2029	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.	TUJUAN RENSTRA OPD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD	INDIKATOR SASARAN RENSTRA OPD	OUTCOME OPD	INDIKATOR OUTCOME OPD	PROGRAM OPD	PD	
	1		2	3	5		6				8	9	10	11	12	13		14	
Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera	2.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya ketangguhan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)				Meningkatnya Ketangguhan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Terkendalnya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	- Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gerakan Kobe Bersinergi						- Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)			
							Meningkatnya keluarga yang sejahtera dan berkualitas								- Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Gerakan Kobe Bersinergi	Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
								- Dimensi Kebahagiaan · Dimensi Kemandirian · Dimensi Ketenteraman	- Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	- Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)									

Table 4.9.

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ibanga	Nilai	60	65,5	66	66,5	67	67,5	68
IPBK	Nilai	68	68,10	69,10	70,10	71,10	72,10	73,10
Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	86,5	87,5	87,8	87,92	88	88,2	88,5
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85,31	86,00	86	86,05	86,05	86,05	86,10
Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	95%
Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	%	5,6 (baseline BKKBN 2023)	6	6	8	10	12	14

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	50	55	56	59	61	61,5	62
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	18,5	14	13	12	11,5	11	10
Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	25,67	25,17	24,67	24,17	23,67	23,17	22,67
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	%	1,81	1,80	1,79	1,78	1,77	1,76	1,75
Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)	%	5,2	5	4,95	4,9	4,85	4,8	4,75

Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja DPPKB dimulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sehingga perlu dinyatakan secara eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan DPPKB yaitu pijakan penyusunan Renja DPPKB tahun 2030.

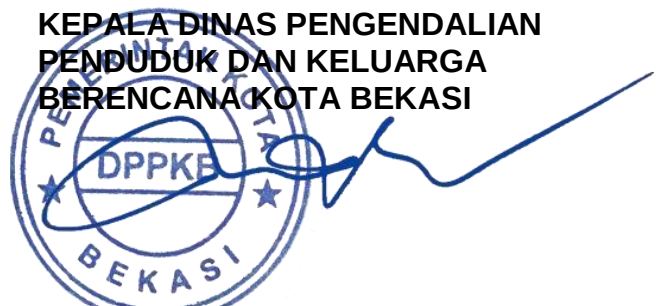
BAB V

PENUTUP

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menyusun Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 dalam rangka mewujudkan program-program kerja yang direncanakan selama 5 (lima) tahun. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi pihak yang terkait dan berkepentingan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Ruang lingkup Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman rencana operasional kegiatan dan dapat menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah dibuat dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan akhir yaitu, Terwujudnya Ketangguhan keluarga.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BEKASI**



Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si
NIP. 19670114 198610 2 001